

PENGARUH PROFITABILITAS DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
TAX AVOIDANCE

Ahmad Bukhori Muslim¹, Nengzih²

¹) Universitas Pelita Bangsa

²) Universitas Mercu Buana

ahmadbukhori@pelitabangsa.ac.id

ABSTRAK

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal. Keputusan ini diambil atas kepentingan pimpinan perusahaan. Faktor yang mempengaruhi tax avoidance diantaranya tingkat laba (profitabilitas) dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan populasi yang digunakan pada penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh profitabilitas dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan sampel yang digunakan yaitu laporan tahunan periode tahun 2012 sampai dengan 2016. Sebanyak 90 perusahaan manufaktur yang telah memenuhi kriteria penelitian dari total populasi. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, (2) komposisi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: profitabilitas, *corporate governance*, komposisi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, *tax avoidance*.

ABSTRACT

Tax avoidance is an attempt to reduce legal tax payable. This decision was made in the interests of the company's leadership. Factors that influence tax avoidance include the level of profit (profitability) and corporate governance (corporate governance). Manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange are the population used in this study. The purpose of this study was to examine the effect of profitability and corporate governance on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The sampling technique used purposive sampling, and the sample used was the annual report for the period 2012 to 2016. A total of 90 manufacturing companies had met the research criteria of the total population. The results of this study indicate (1) profitability has a significant negative effect on tax avoidance, (2) board of commissioners composition, managerial ownership, and institutional ownership have no significant effect on tax avoidance.

Keywords: *profitability, corporate governance, a board of commissioners composition, managerial ownership, institutional ownership, tax avoidance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran penerimaan negara bagi negara-negara berkembang. Perhatian yang besar pada sektor pajak ini dilakukan oleh pemerintah negara-negara di dunia. Namun, terdapat kendala dalam mengoptimalkan penerimaan sektor ini. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, dan cukup banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan akan membayarkan pajaknya seminimal mungkin, karena bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Hardika, 2007 dalam Kurniasih dan Sari, 2013).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan

sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* sendiri bukanlah suatu hal yang tanpa sengaja dilakukan oleh perusahaan, keputusan tersebut diambil melalui kebijakan dari pimpinan perusahaan (Budiman dan Setiono, 2012). Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah Wajib Pajak masuk ke dalam ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Bovi, 2005 dalam Annisa & Kurniasih, 2012).

Perusahaan Modal Asing pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan yang berada di Indonesia. PMA tersebut melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi selama 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005 dalam Prakosa, 2014). Terdapat 4.000 PMA melaporkan nihil nilai pajaknya berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012, umumnya perusahaan tersebut mengalami kerugian sela 7 tahun berturut-turut dan perusahaan yang bergerak bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (Dirjen Pajak, 2013 dalam Prakosa, 2014).

Perusahaan multinasional di Indonesia pun masih ada yang tidak menjalankan kewajibannya berupa pembayaran pajak kepada negara, tercatat hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajak selama 7 tahun (Agusti, 2014). Penghindaran pajak juga terjadi di Amerika, kurang dari seperempat total perusahaan yang beroperasi melakukan tindakan penghindaran pajak melalui pembayaran pajak kurang dari 20% dengan rata-rata pembayaran pajak mendekati 30% (Dyrenge *et al.*, 2008 dalam Prakosa, 2014).

Potensi pengurangan PPh badan yang dibayar perusahaan di Indonesia cenderung melakukan peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk (*parent company*) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan. Berdasarkan data laporan keuangan di BEI, sebuah perusahaan *consumer goods* harus membayar royalti kepada *holding company* di Belanda, dari 3,5% meningkat ke 5%-8% mulai tahun 2013-2015. Asumsi omset tahun 2013-2015, *consumer goods* tersebut stagnan di angka Rp 27 triliun, dengan kenaikan royalti dari 3,5% menjadi 8%, berarti ada kenaikan royalti sebesar 4,5% dikalikan Rp 27 triliun atau sekitar Rp 1,215 triliun. Sebesar Rp 303 milyar merupakan potensial *loss* PPh badan tahun 2015 yaitu sebesar 25 persen dari total Rp 1,215 triliun. Menurut aturan hal tersebut merupakan tindakan yang legal, namun kurang adil jika dilihat dari sisi pajak bagi negara sumber penghasilan, karena 8 persen harga produk dibayar rakyat Indonesia lari ke royalti *holding company*. Kejadian ini sangatlah mungkin terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan merupakan masalah yang utama bagi pemerintah, karena pajak perusahaan merupakan kontribusi utama dan terbesar bagi pendapatan pemerintah (Agusti, 2014).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak tersebut, yaitu profitabilitas dan *corporate governance*. Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance*, diantaranya memfokuskan pada tingkat profitabilitas perusahaan.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Efektivitas suatu perusahaan yang diambil berdasarkan pengembalian hasil penjualan dan investasi disebut sebagai rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas terdiri dari profit *margin*, *basic earning power*, *return on assets*, dan *return on equity*. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Return on Asset (ROA). Indikator performa keuangan perusahaan dicerminkan oleh *Return on Assets* (ROA), pengukuran performa perusahaan dinilai baik ketika nilai ROA semakin tinggi dan semakin baik mengungkapkan kewajiban pajaknya (Darmawan dan Sukartha, 2014), sedangkan (Maharani dan Suardana, 2014) menyatakan bahwa semakin tinggi ROA justru menurunkan performa perusahaan dan semakin kecil tingkat penghindaran pajaknya.

Selain profitabilitas, peneliti akan menganalisis mengenai keterkaitan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Keputusan yang diambil perusahaan dipengaruhi oleh kondisi tata kelola perusahaan. Buruknya tata kelola perusahaan, mengakibatkan tindakan penghindaran pajak yang tidak bernilai bagi pemegang saham sehingga mengurangi nilai perusahaan (Wahab dan Holland, 2012) dalam (Oktofian, 2015). Perusahaan dengan tata kelola yang buruk, saat terjadi peningkatan keuntungan bagi manajer berupa kompensasi, mengalami penurunan tingkat penghindaran pajak, yang seharusnya dilakukan untuk pemegang saham. Sedangkan perusahaan dengan tata kelola yang baik ternyata memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi (Desai & Darmapala, 2006).

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan menentukan arah kinerja perusahaan Haruman (2008) dalam Annisa (2012). *Corporate governance* dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham, hal ini bisa disimpulkan bahwa semakin baik mekanisme *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan maka nilai tambahnya semakin besar. Aturan struktur *corporate governance* akan mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi disisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Frieze, 2006 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012).

Aspek *corporate governance* dalam penelitian ini adalah komposisi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Dewan komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Pengertian terafiliasi sendiri adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresifitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Wulandari, 2005).

Muhammad Fajri Saputra, Dandes Rifa, Novia Rahmawati (2015), Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016), dan Wirna Yola Agusti (2014) menyatakan proporsi dewan komisari tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan I Gusti Ayu Cahya Maharani, Ketut Ali Suardana (2014) menyatakan bahwa proporsi dewan komisari berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Wibawa, Wilopo, dan Yusri Abdilah. (2016), Pohan (2008) dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Aspek yang mempengaruhi kebijakan dividen yaitu struktur kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu aspek *corporate governance* yang dapat mengurangi *agency cost* apabila persinya dalam struktur kepemilikan di perusahaan ditingkatkan. Selain itu, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan (Sisca Christianty Dewi, 2008: 48). Hasil penelitian Muhammad Oktofian (2015) menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil berbeda didapatkan oleh Pohan (2008), Batara Wiryo Pramudito dan Maria M. Ratna Sari (2015) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Selain kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional juga merupakan *corporate governance* yang dipandang dapat mengurangi *agency cost*. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan institusional mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menentang kebijakan manajer (Karinaputri, 2012:23). Kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham oleh pihak luar baik dalam bentuk institusi, lembaga atau kelompok lainnya (Marselina Widiastuti, Pranata P. Midiastuty, dan Eddy Suranta, 2013:3403). Kepemilikan institusional dianggap dapat memonitor kinerja manajemen.

Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin kuat kontrol eksternal terhadap manajerial perusahaan. Hal tersebut dapat berdampak pada berkurangnya biaya agensi dan perusahaan cenderung membayarkan dividen yang rendah. Selaras dengan penelitian (Putri &

Nasir (2006), (Dewi, 2008) yang memberikan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Keberadaan institusi sebagai mekanisme *monitoring* tidak dibutuhkan lagi ketika *agency cost* berkurang akibat adanya pembayaran dividen yang tinggi oleh perusahaan. Penelitian Sisca juga menunjukkan hasil yang sama bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Namun hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012), Khoirunnisa (2015), Ghita Lisnawati (2016), Muhammad Oktofian (2015) kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian berbeda didapatkan oleh Ngadiman & Puspitasari (2014), Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, sebab penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*). Penghindaran pajak tidak diinginkan, namun diperbolehkan. *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang merupakan salah satu indikator penghindaran pajak, digunakan dalam penelitian ini. Jumlah kas yang sebenarnya dibayarkan perusahaan dalam membayar pajak dicerminkan oleh CETR. Melalui laporan arus kas dapat diketahui kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan melalui CETR (Dyrenge, *et al.*, 2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun periode laporan keuangan dari tahun 2012-2016 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, selain itu proksi penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Pemilihan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian dikarenakan aktivitas usaha yang dilakukan secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku sampai dengan penjualan produk jadi. Seluruh aktivitas usaha yang dilakukan sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan. Selain itu penyumbang terbesar penerimaan pajak negara didapat dari perusahaan manufaktur terutama yang terdaftar di BEI, dengan penerimaan sebesar 316,49 triliun di tahun 2012 dan 333,73 triliun pada tahun 2013 (*Inside Tax* edisi 18, 2013:34).

KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory

Agency Theory menjelaskan bahwa organisasi merupakan jaringan hubungan kontraktual antara manager (agen) dengan pemilik perusahaan, kreditur, dan pihak lainnya (prinsipal). Dalam teori ini, individu yang rasional, memiliki kepentingan pribadi dan berusaha memaksimalkan kepentingan pribadinya diasumsikan sebagai agen. Manager sebagai agen bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (prinsipal), namun di sisi lain manajer juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sehingga ada kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan pribadi prinsipal (Adi & Nur, 2013). Kondisi ketidakseimbangan informasi antara agen dan prinsipal yang terjadi dinamakan asimetri informasi (*information asymmetry*).

Conflict of interest dipacu oleh masalah keagenan (*agency problem*) antara pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan manajer potensial, hal ini terjadi apabila saham yang dimiliki oleh prinsipal merupakan saham minoritas perusahaan. Pemegang saham tentu menginginkan manajemen bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran sendiri. Dalam meyakinkan pekerjaan yang dilakukan manajer dengan sungguh-sungguh, pemilik saham harus mengeluarkan biaya agen (*agency cost*) (Atmaja, 2008 dalam Zuesty, 2016).

Konflik terjadi pada kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak dan pihak yang membayar pajak (manajemen perusahaan) yang digambarkan dalam penelitian ini. Manajemen memiliki pandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah, sedangkan fiskus mengharapkan adanya pemasukan yang besar dalam pemungutan pajak. Akibatnya dari kedua sudut pandang yang berbeda menimbulkan konflik

antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Prakosa, 2014).

Tax Avoidance

Perbuatan yang dilakukan dengan tidak memberi alasan untuk dikenakan pajak dinamakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) Menurut Murtopo (2011:7), penghindaran pajak yang dilakukan masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016), Salah satu usaha dalam meringankan beban pajak dan tidak melanggar undang-undang dapat dilakukan melalui penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Menurut Utami (2013) *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang bertujuan untuk meminimalisasi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole* dalam ketentuan perpajakan suatu negara sehingga dikatakan legal karena tidak melanggar aturan perpajakan. Begitu juga dengan Hutagaol (2007) dalam Muhammad Fajri Saputra, Dandes Rifa, Novia Rahmawati (2015) menyebutkan bahwa *tax avoidance* yaitu pengurangan jumlah pajak terutang yang diambil dari kelemahan (*loopholes*) sebagai salah satu cara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan melalui penghindaran pajak.

Upaya pengurangan atau penghematan pajak selama hal tersebut dimungkinkan dan tidak menyalahi aturan merupakan definisi penghindaran pajak yang telah disampaikan sebelumnya. Contoh penghindaran pajak adalah dengan cara mengarahkan transaksi pada transaksi yang bukan merupakan objek pajak ataupun mengarahkan transaksi yang menghasilkan biaya yang diperkenankan oleh undang-undang sebagai penghasilan kena pajak (Carolina *et al.*, 2014).

Dalam literatur keagenan, *tax avoidance* dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai. *Tax avoidance* menggambarkan sebuah kelanjutan dari strategi perencanaan perpajakan perusahaan. Aktivitas *tax avoidance* memunculkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor (Desai dan Dharmapala, 2006 dalam Ningtias, 2015). Manajer dapat membenarkan transaksi atas *tax avoidance* dengan mengklaim bahwa kompleksitas dan ketidaktahuan menjadi hal yang penting dalam meminimalkan terdeteksinya aktivitas *tax avoidance* pemeriksa pajak.

Ada pula risiko penghindaran pajak yang lain. Karena yang menggerakkan jalannya perusahaan adalah manajer, maka pelaku utama penghindaran pajak adalah mereka. Manajer yang menentukan seberapa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Masalah timbul bila manajer memanfaatkan posisinya untuk mengalihkan sumberdaya perusahaan bagi keuntungan pribadinya, yang biasa disebut dengan masalah agensi. Disinilah peran tata kelola perusahaan yang merupakan mekanisme untuk mengontrol manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Puspita, 2014).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga dapat mengetahui berapa jumlah kas sesungguhnya dibayarkan perusahaan (Rinaldi dan Charoline, 2015). Menurut Dyreng *et al.* (2010) CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak perusahaan dengan maksud dapat melihat *cash flow* untuk pembayaran pajak.

Profitabilitas

Menurut Sutrisno (2009), profitabilitas adalah resiko keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan, semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengolah perusahaan. Menurut Munawir (2010), profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan yang kemampuan menggunakan secara produktif.

Menurut Bringham (2011:146) "*Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen asset dan utang pada hasil operasi*".

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dan mencari keuntungan (laba). Perusahaan yang memperoleh keuntungan (laba) diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani & Suardana, 2014).

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diukur dengan melihat *Return on Assets (ROA)*. ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani dan Suardana, 2014).

Corporate Governance

Corporate Governance yang dikutip dalam (Effendi, 2009:1) “*Corporate governance is a company’s system of internal control, which has as its principal aim the management of risk that are significant to the fulfillment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enhancing over time the value of the shareholders investment*”.

Corporate governance adalah sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008).

Menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) *Corporate Governance* “*a set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled.*”

Dari uraian diatas, *Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Komalasari, 2014:4).

Komposisi Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Komposisi individu yang bekerja sebagai anggota dewan komisaris merupakan hal penting dalam memonitor aktivitas manajemen secara efektif (Fama dan Jensen, 1983 dalam Wakid *et al.*, 2012:10). Coller dan Gregory (1999) menyatakan bahwa semakin besar anggota dewan komisaris maka semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan memonitoring sehingga yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen akan semakin besar untuk mengungkapkannya (Wakid *et al.*, 2012:10).

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2008). Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No.

SE305/BEJ/07- 2004 perihal komisaris independen di perusahaan publik, disebutkan bahwa:

- a) Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang:
 - 1) Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
 - 2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
 - 3) Tidak mempunyai afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
 - 4) Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.
- b) Memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Komisaris Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

Di Indonesia, dewan manajemen disebut sebagai dewan direksi dikepalai oleh direktur utama dan dewan pengawas disebut sebagai dewan komisaris. Dewan komisari sering dipakai untuk mewakili kepentingan dari berbagai kelompok *stakeholder*. Sistem dewan *two-tier* dipandang lebih baik untuk *stakeholder* daripada sistem *unitary* (Solomon, 2007). Perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya berbasis *two-tier board system* atau *two board system* seperti kebanyakan perusahaan di Eropa. Secara konseptual *model two-tier system* dengan tegas memisahkan keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas dan direksi sebagai eksekutif korporasi. Di Indonesia, ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan Direksi dan Komisaris diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1995 yang sekarang diperbarui menjadi UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam UU PT jelas terlihat bahwa kedudukan direksi dan komisaris secara tegas dipisahkan, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem yang dianut dalam UU PT adalah *two-tier board system*.

Kepemilikan Manajerial

Menurut Downes dan Goodman (1999) dalam Agustiani (2013), pengertian kepemilikan manajerial adalah: “para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan.”

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen (Boediono, 2005), Herawati (2008) . Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, Josua dan Yulius Yogi Christiawan, 2007:2). Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, Josua dan Yulius Yogi Christiawan, 2007:2).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih gait untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adanya dirinya sendiri. Pohan (2008) mengatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajerial maka akan semakin baik kinerja perusahaan, dikarenakan hal tersebut membantu menyatukan kepentingan pemegang saham dan manajer.

Kepemilikan Institusional

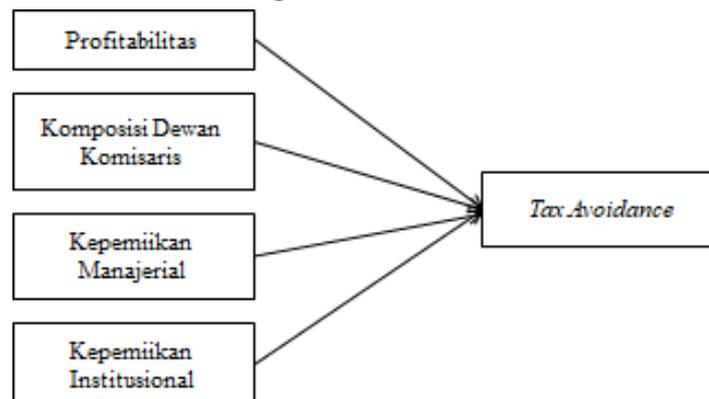
Institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan investor institusi lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor individual. Institusi sebagai investor yang *sophisticated* karena mempunyai kemampuan dalam memproses informasi dibandingkan dengan investor individual. Dengan demikian, akan semakin

membatasi manajemen dalam memainkan angka-angka dalam laporan keuangan (Saptatinah, 2005).

Menurut Faisal (2004), kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen.

Model kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Penelitian



Sumber: Data diolah, 2017

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva dikenal dengan *Return On Asset*. *Return On Asset* berguna mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Siahaan, 2004). Dendawijaya (2003:120) menyatakan *Return On Asset* menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan. Semakin tinggi *Return On Asset*, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196), *Return On Asset* merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi nilai dari *Return On Asset*, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya.

Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratnasari (2013) dan Muhammad Fajri Saputra, Dandes Rifa, Novia Rahmawati (2015) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil *Return On Asset* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Rinaldi dan Charoline (2015) menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Prakosa (2014) dan Maharani dan Suardana (2014) menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016) yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Return On Asset merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi nilai dari *Return On Asset*, semakin tinggi nilai laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya (Prakosa, 2014). Tingginya profitabilitas perusahaan akan menggunakan *pecking order theory*, di mana perusahaan lebih memilih pendanaan internal dan memperoleh insentif dari pengelolaan aset yang dapat mengurangi beban pajak. Maharani dan Suardana (2014) menyebutkan bahwa perusahaan memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Prakosa (2014)

menyebutkan jika *Return On Asset* mengalami peningkatan, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan.

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa semakin besar presentase dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan menuntut manajemen bekerja lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer, sehingga keberadaan mereka tidak hanya menjadi simbol semata. Penelitian Muhammad Fajri Saputra, Dandes Rifa, Novia Rahmawati (2015), Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016) menyatakan proporsi dewan komisari tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Demikian juga penelitian Wirna Yola Agusti (2014) menyatakan *corporate governance* (proporsi dewan komisaris independen) tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Meskipun demikian hasil penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani, Ketut Ali Suardana (2014) menyatakan bahwa proporsi dewan komisari berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dan penelitian yang dilakukan oleh Agus Wibawa, Wilopo, dan Yusri Abdilah. (2016) dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Begitu pula dengan hasil penelitian Pohan (2008) membuktikan bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan *tax evasion* manajemen kerap kali bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer.

H2: Komposisi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah kepemilikan saham manajerial di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Sehingga bertambahnya jumlah kepemilikan saham manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan, sehingga kebijakan perpajakan tidak akan mendukung *tax avoidance* untuk dilakukan.

Penelitian Pohan (2008) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Senada dengan hasil penelitian Pohan (2008), Batara Wiryono Pramudito dan Maria M. Ratna Sari (2015) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian Muhammad Oktofian (2015) menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial, maka konsentrasi kepemilikan perusahaan tersebut lemah, dan tata kelola lebih baik. Dengan banyak insentif, mereka menjadi memperhatikan kebijakan strategis perusahaan dan termotivasi mengontrol pekerjaannya. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tidak terlalu tersebar tidak memiliki masalah dalam profitabilitasnya. Motivasi para manajerial dalam mendapatkan laba yang sebesar-besarnya menjadikan strategi pajak yang diambil agresif. Maka dengan semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah (Timothy, 2010).

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Menurut penelitian Rahmi Fadhilah (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh

terhadap *tax avoidance*. Pertama, kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi diluar kepemilikan saham dewan komisaris perusahaan, dimana pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun demikian bisa saja pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *tax avoidance* terjadi.

Kedua, kepemilikan institusional berfikir memaksimalkan kesejahteraan mereka terutama pada keuntungan atau laba yang akan mereka peroleh pada perusahaan sehingga semua kegiatan yang akan merugikan perusahaan termasuk adanya pajak agresif yang akan dilakukan perusahaan, jika kegiatan itu menguntungkan bagi kesejahteraan pemilik institusional maka mereka akan tetap mendukung setiap kegiatan atau kebijakan yang akan dilakukan perusahaan sehingga besar atau kecilnya kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.

Ketiga, pemilik institusional kurang peduli dengan citra perusahaan asalkan itu bisa memaksimalkan kesejahteraan mereka walaupun adanya perilaku manajer dalam hal mengambil suatu keputusan terutama dalam hal pajak yaitu tindakan *tax avoidance*. Senada dengan penelitian Annisa dan Kurniasih (2012), Khoirunnisa (2015), Ghita Lisnawati (2016), Muhammad Oktofian (2015) kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan hasil penelitian Ngadiman & Puspitasari (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan bertanggung jawab atas pemegang saham, oleh karena itu pemilik institusi memastikan perusahaan menjalankan perusahaan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga semakin besar saham yang dimiliki intansi, semakin besar pula pengawasan yang dilakukan oleh instansi tersebut. Dengan besarnya pengawasan yang dilakukan oleh intansi, akan mengurangi manajer dalam melakukan kecurangan. Salah satu kecurangan tersebut adalah melakukan penghindaran pajak.

Senada dengan hasil penelitian Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* begitu juga dengan hasil penelitian Pohan (2008) dan Aisha Zuesty (2016) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hanum dan Zulaikha (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa investor institusional pada dasarnya ingin mendapatkan laba setinggi-tingginya yang menyebabkan pihak manajemen melakukan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Dewi dan Jati (2014) menyatakan bahwa keberadaan investor institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak investor kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan penghindaran pajak dalam rangka memperoleh laba yang maksimal untuk investor institusional. Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak melalui tax agresif yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder institusional* akan meningkatkan penghindaran pajak, akan tetapi semakin besar *long-term shareholder institusional* akan semakin mengurangi kebijakan penghindaran pajak (Khurana dan Moser, 2009). Penelitian dari Pranata, Puspa, dan Herawati (2014) juga menyatakan bahwa besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan.

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Manajemen perusahaan akan melakukan kebijakan guna mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Pemegang saham eksternal mempunyai insentif untuk memonitor dan mempengaruhi manajemen secara wajar untuk melindungi investasi mereka dalam perusahaan. Pemegang saham eksternal mengurangi perilaku manajer yang oportunis, sehingga mengakibatkan rendahnya konflik agensi langsung antara manajemen dan pemegang saham (Wahidahwati, 2002).

H4: kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

METODE PENELITIAN

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisa model regresi linear berganda, dikarenakan dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan lebih dari satu dengan bantuan alat pengolahan data yaitu SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) 20.0 for windows, untuk mengukur pengaruh antara variabel independen dengan dependen dan menguji hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1 \text{Prof} + \beta_2 \text{KDK} + \beta_3 \text{KM} + \beta_4 \text{KI} + \varepsilon$$

Keterangan:

TA	= Tax Avoidance
α	= Konstanta
β_1, β_2, \dots	= Koefisien regresi
Prof	= Profitabilitas
KDK	= Komposisi Dewan Komisaris
KM	= Kepemilikan Manajerial
KI	= Kepemilikan Institusional
ε	= error

Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Tax Avoidance

Model estimasi pengukuran *tax avoidance* menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen *et al.*, 2010).

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Income}}$$

2) Profitabilitas

ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani dan Suardana, 2014). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memosisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al.*, 2010). Pengukuran profitabilitas pada penelitian ini mengacu pada Lina (2013:54).

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$$

3) Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi dewan komisaris adalah menghitung presentase jumlah total dari anggota dewan komisaris, baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan sampel (Ujiyanto, 2007 dalam Wiyarsi, 2012) dalam penelitian ini menggunakan rumus:

$$\text{Komposisi Dewan Komisaris} = \text{DK internal} + \text{DK eksternal}$$

4) Kepemilikan Manajerial

Menurut Agnes dan Juniarti (2008) dalam Sabila (2012) kepemilikan manajerial diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh modal

saham perusahaan yang beredar. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Manajemen}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

5) Kepemilikan Institusional

Variabel ini diukur dari jumlah presentase saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun. Kepemilikan Institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut (Fury K Fitriyah dan Dina Hidayat, 2011:35):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yaitu merupakan teknik penentuan sampel dimana seluruh anggota populasi berpotensi untuk menjadi anggota sampel dengan memilihnya berdasarkan kriteria-kriteria serta berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tertentu. Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016.
2. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian.
3. Perusahaan menyajikan *annual report* dalam mata uang rupiah.
4. Perusahaan manufaktur yang menyajikan data yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian.

Berdasarkan kriteria yang ditentukan, sampel yang akan digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2012-2016 sebanyak 18 perusahaan.

HASIL PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016. Sampel perusahaan berjumlah 18 perusahaan dengan masa penelitian 5 tahun menggunakan metode *purposive sampling* sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR (Y)	90	.045619	.920797	.31162199	.144495054
ROA (X1)	90	.006554	.321145	.07912669	.062902176
KDK (X2)	90	2.000000	8.000000	3.94444444	1.326998058
KM (X3)	90	.000000	.256198	.07213673	.092736124
KI (X4)	90	.057714	.980000	.63028806	.224058378
Valid (listwise)	N 90				

Sumber: SPSS 20, data diolah 2017.

Berdasarkan tabel 1, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 18 perusahaan selama 5 tahun periode 2012-2016, dengan hasil sebagai berikut:

- a) *Tax Avoidance* memiliki nilai maksimum sebesar 0.920 oleh PT Trias Sentosa Tbk tahun 2016 dengan nilai *cash tax paid* sebesar Rp 21,357,853,296 dan *pre tax income* sebesar Rp 23,194,967,133. Nilai minimum sebesar 0.045 oleh Pelangi Indah Canindo Tbk tahun 2016 dengan nilai *cash tax paid* sebesar Rp 813,198,290 dan *pre tax income* sebesar Rp 17,825,721,005. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.311 lebih besar dari standar deviasi sebesar 0.144 menunjukkan ukuran penyebaran CETR cenderung homogen karena lebih kecil dari nilai rata-ratanya.
- b) Profitabilitas (ROA) memiliki nilai maksimum sebesar 0.321 oleh PT Lionmesh Prima Tbk tahun 2012 dengan nilai *net income* sebesar Rp 41,282,515,026 dan total *asset* sebesar Rp 128,547,715,366. Nilai minimum sebesar 0.006 oleh PT Indal Aluminium Industry Tbk tahun 2013 dengan nilai *net income* sebesar Rp 5,019,540,731 dan total *asset* sebesar Rp 765,881,409,376. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.079 lebih besar dari standar deviasi sebesar 0.062 menunjukkan ukuran penyebaran profitabilitas cenderung homogen karena lebih kecil dari nilai rata-ratanya.
- c) Komposisi dewan komisaris (KDK) memiliki nilai maksimum sebesar 8.0 oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2012-2016 dengan jumlah kepemilikan komposisi dewan komisaris sebanyak 8 orang. Nilai minimum sebesar 2.0 oleh PT Pelangi Indah Canindo Tbk tahun 2013 dengan jumlah kepemilikan komposisi dewan komisaris sebanyak 2 orang. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3.944 lebih besar dari standar deviasi sebesar 1.326 menunjukkan ukuran penyebaran komposisi dewan komisaris cenderung homogen, karena lebih kecil dari nilai rata-ratanya.
- d) Kepemilikan manajerial (MNJR) memiliki nilai maksimum sebesar 0.256 oleh PT Lionmesh Prima Tbk tahun 2012-2013 dengan jumlah saham manajerial sebesar 2,459,500 yang dimiliki oleh Jusuf Sutrisno sebagai Presiden Komisaris sebesar 1,353,000, Lawer Supendi sebagai Presiden Direktur sebesar 1,103,500, dan Warno sebagai Direktur sebesar 3,000 dan jumlah saham yang beredar sebesar 9,600,000. Nilai minimum sebesar 0.000 oleh PT Indal Aluminium Industry Tbk tahun 2012 dengan jumlah saham manajerial sebesar 0 dan jumlah saham yang beredar sebesar 158,400,000. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.072 lebih kecil dari standar deviasi sebesar 0.092 menunjukkan ukuran penyebaran struktur kepemilikan cukup tinggi karena lebih besar dari nilai rata-ratanya.
- e) Kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai maksimum sebesar 0.980 oleh PT Aneka Gas Industri Tbk tahun 2012-2013, dengan jumlah saham institusional sebesar 8,000 yang dimiliki oleh Rachmat Harsono sebagai Wakil Direktur Utama dan jumlah saham yang beredar sebesar 400,000 pada tahun 2012, jumlah saham institusional sebesar 10,300 yang dimiliki oleh Rachmat Harsono sebagai Wakil Direktur Utama dan jumlah saham yang beredar sebesar 515,000 pada tahun 2013. Nilai minimum sebesar 0.057 oleh PT Lion Metal Works Tbk tahun 2015-2016 dengan jumlah saham institusional sebesar 30,012,000 yang dimiliki oleh Lion Holding Pte. Ltd., Singapura sebesar 150,060,000 dan Lion Holding Sdn. Bhd., Kuala Lumpur sebesar 150,060,000 dan jumlah saham yang beredar sebesar 520,016,000. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.630 lebih kecil dari standar deviasi sebesar 0.224, menunjukkan bahwa ukuran penyebaran struktur Kepemilikan Institusional cenderung homogen karena lebih kecil dari nilai rata-ratanya.

Uji Asumsi dan Kualitas Instrumen Penelitian

Uji Normalitas

Salah satu cara melihat normalitas adalah dengan melakukan uji *Kolmogorov-smirnov*. Dasar dalam pengambilan keputusan adalah jika *two-tailed* > 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya. Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dijelaskan dalam tabel 2 berikut:

Tabel. 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.13598232
	Absolute	.132
Most Extreme Differences	Positive	.132
	Negative	-.084
Kolmogorov-Smirnov Z		1.253
Asymp. Sig. (2-tailed)		.087

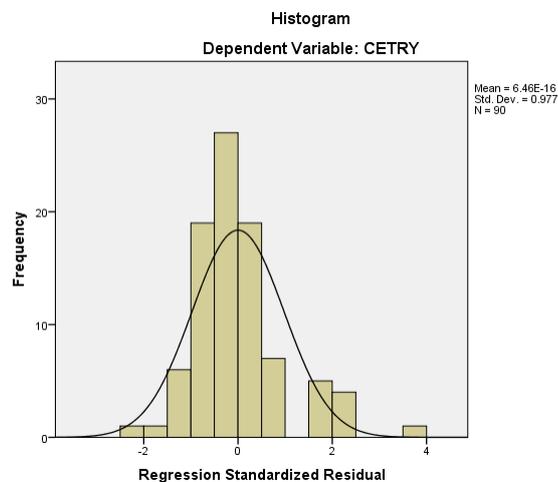
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: SPSS 20, data diolah 2017 .

Tabel 2 menunjukkan bahwa data residual dari perhitungan regresi antara variabel independen dan variabel dependen memiliki nilai *Kolmogorov_Smirnov Z* sebesar 1.253 dengan nilai probabilitas $0.087 > 0.05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal. Untuk memastikan data dalam model regresi berdistribusi normal dapat pula dilihat dari *histogram error* berikut ini:

Gambar 2
Histogram Error Normalitas Regresi



Sumber: SPSS 20, data diolah 2017.

Berdasarkan gambar 2, penyebaran data variabel-variabel penelitian mengikuti garis normalitas sehingga dapat disimpulkan sebaran data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas, berdasarkan *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF) dengan dasar acuan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas.
- 2) Jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinieritas.

Tabel 3

Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.425	.094		4.507	.000		
1 ROA (X1)	-.742	.242	-.323	-3.070	.003	.941	1.063
KDK (X2)	.007	.012	.066	.596	.553	.857	1.167
KM (X3)	-.255	.223	-.164	-1.144	.256	.510	1.962
KI (X4)	-.103	.089	-.159	-1.153	.252	.547	1.830

a. Dependent Variable: CENTRY

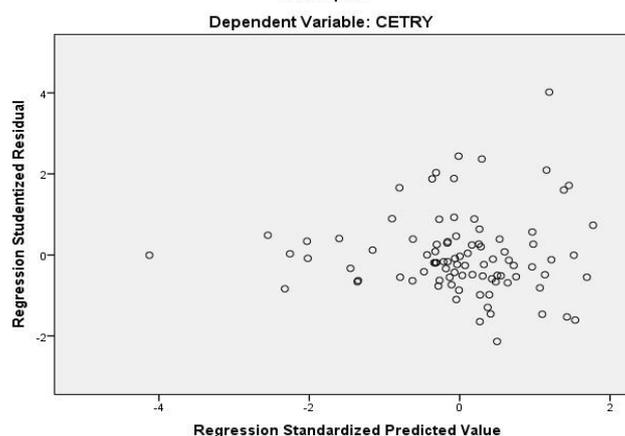
Sumber: SPSS 20, data diolah 2017.

Dari table 3, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel independen tidak lebih dari 10 dan *tolerance value* > 0.10, sehingga menandakan model regresi tidak mengandung multikolonieritas.

Uji Heterokedastisitas

Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *Scatterplot* model tersebut. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 3:

Gambar 3
Pola Scatterplot
Scatterplot



Sumber: SPSS 20, data diolah 2017.

Gambar 3 memperlihatkan bahwa :

- 1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- 2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- 4) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.
- 5) Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilihat dari besaran nilai Durbin Watson. Model regresi dinyatakan bebas dari problem autokorelasi jika nilai $DW - 2 \leq DW \leq 2$ (Sarwono, 2017:150). Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada table 4:

Tabel 4
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.338 ^a	.114	.073	.139145120	1.041

a. Predictors: (Constant), KIX4, KDKX2, ROAX1, KMX3

b. Dependent Variable: CETRY

Sumber: SPSS 20, data diolah 2017.

Berdasarkan hasil pengujian dengan statistik Durbin Watson (DW) terhadap regresi pada taraf signifikansi (a) 0.05, k = 4, n = 90, diperoleh nilai DW sebesar 1.041. Dari hasil perhitungan disimpulkan bahwa nilai DW-test sebesar 1.041 terletak pada daerah uji atau daerah yang bebas dari asumsi autokorelasi atau secara matematis ditulis $DW - 2 \leq DW \leq 2$ ($1.041 - 2 \leq 1.401 \leq 2$).

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Nilai R² dikatakan baik jika diatas 0,5 karena nilai R² berkisar antara 0 sampai 1. Hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 5
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			
						F	df1	df2	Sig. F Change
1	.338 ^a	.114	.073	.139145120	.114	2.744	4	85	.034

a. Predictors: (Constant), KIX4, KDKX2, ROAX1, KMX3

b. Dependent Variable: CETRY

Sumber: SPSS 20, data diolah 2017.

Nilai Uji *R-Square* adalah sebesar 7.3%, hal ini bahwa variasi variabel independen yang digunakan pada model penelitian ini (profitabilitas, komposisi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional) hanya mampu menjelaskan variabel dependen (*tax avoidance*) sebesar 7.3% dari seluruh variabel yang ada. Maka dapat dikatakan, sebesar 92.7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan yang ada dan tidak diteliti oleh peneliti.

Uji Signifikansi Simultan

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (5%) maka ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Apabila signifikansi > 0,05 (5%) maka H0 diterima (Ha ditolak).
2. Apabila signifikansi < 0,05 (5%) maka H0 ditolak (Ha diterima).

Hasi uji signifikansi simultan (Uji F) sebagai berikut:

Tabel 6
Uji Signifikansi Simultan
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.212	4	.053	2.744	.034 ^b
	Residual	1.646	85	.019		
	Total	1.858	89			

a. Dependent Variable: CETRY

b. Predictors: (Constant), KIX4, KDKX2, ROAX1, KMX3

Sumber: SPSS 20, data diolah 2017.

Dari hasil perhitungan uji F seperti pada tabel 4.6, menunjukkan bahwa nilai hitung F sebesar 2.744 dengan nilai signifikansi sebesar $0.034 < 0.05$. Angka ini bermakna bahwa

Profitabilitas, Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Uji Signifikansi Parameter Individual

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (5%) maka ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Apabila signifikansi > 0,05 (5%) maka H0 diterima (Ha ditolak).
2. Apabila signifikansi < 0,05 (5%) maka H0 ditolak (Ha diterima). Berikut adalah hasil pengujian secara parsial (uji t):

Tabel 7
Uji Signifikansi Parameter Individual

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.425	.094		4.507	.000
ROAX1	-.742	.242	-.323	-3.070	.003
1 KDKX2	.007	.012	.066	.596	.553
KMX3	-.255	.223	-.164	-1.144	.256
KIX4	-.103	.089	-.159	-1.153	.252

a. Dependent Variable: CETRY

Sumber: SPSS 20, data diolah 2017.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7 menunjukkan hasil bahwa:

- a. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung -3.070 dan nilai signifikansi 0.003 < 0.05.
- b. Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung 0.596 dan nilai signifikansi 0.553 > 0.05.
- c. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung -1.144 dan nilai signifikansi 0.256 > 0.05.
- d. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung -1.153 dan nilai signifikansi 0.252 > 0.05.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh profitabilitas dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 20 for windows.

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.425	.094		4.507	.000
ROAX1	-.742	.242	-.323	-3.070	.003
1 KDKX2	.007	.012	.066	.596	.553
KMX3	-.255	.223	-.164	-1.144	.256
KIX4	-.103	.089	-.159	-1.153	.252

a. Dependent Variable: CETRY

Sumber: SPSS 20, data diolah 2017.

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 8, menunjukkan hasil bahwa diperoleh nilai konstanta (a) sebesar 0.425 dengan nilai koefisien regresi masing-masing variabel adalah ROA sebesar -0.742, KDK sebesar 0.007, KM sebesar -0.255, dan KI sebesar -0.103, sehingga membentuk persamaan garis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$TA = 0.425 - 0.742ROA + 0.007KDK - 0.255KM - 0.103KI + e$$

Keterangan:

TA	: <i>Tax Avoidance</i>
ROA	: <i>Return On Asset</i>
KDK	: Komposisi Dewan Komisaris
MNJR	: Kepemilikan Manajerial
KI	: Kepemilikan Institusional
<i>e</i>	: Nilai residu

PEMBAHASAN

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 8, profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan nilai t hitung -3.070 dan nilai signifikansi $0.003 < 0.05$. Justifikasi hasil penelitian ini bahwa jika ROA mengalami peningkatan, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan dikarenakan perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

Hal ini sejalan dengan Maharani dan Suardana (2014) dan Prakosa (2014) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh ROA terhadap *Tax Avoidance* dengan hasil berpengaruh negatif. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 8, komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan nilai t hitung 0.596 dan nilai signifikansi $0.553 > 0.05$. Justifikasi hasil penelitian ini bahwa komposisi dewan komisaris tidak mampu menuntut manajemen bekerja lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Muhammad Fajri Saputra, Dandes Rifa, Novia Rahmawati (2015), Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016), dan Wirna Yola Agusti (2014) menyatakan proporsi dewan komisari tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini berbeda dengan I Gusti Ayu Cahya Maharani, Ketut Ali Suardana (2014) menyatakan bahwa proporsi dewan komisari berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Agus Wibawa, Wilopo, dan Yusri Abdilah. (2016), Pohan (2008) dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 8, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung -1.144 dan nilai signifikansi $0.256 > 0.05$. Justifikasi hasil penelitian ini bahwa walaupun manajer memiliki saham di perusahaan tersebut, manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya (*entrenchment*) bukan pada upaya menyelaraskan kepentingannya dengan pemilik perusahaan (*alignment*) karena kepemilikan saham yang dimiliki manajer cukup sedikit. Kepemilikan manajerial yang relatif sedikit belum menyelesaikan persoalan keagenan yang terjadi antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer) dimana dengan adanya kepemilikan saham manajerial dapat mengurangi perilaku oportunistik yang dilakukan manajer dapat merugikan pemilik perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Muhammad Oktofian (2015) dan Dyan (2016) menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil berbeda didapatkan oleh Pohan (2008), Batara Wiryo Pramudito dan Maria M. Ratna Sari (2015) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 8, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung -1.153 dan nilai signifikansi $0.252 > 0.05$. Justifikasi hasil penelitian ini bahwa kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi diluar kepemilikan saham dewan komisaris perusahaan, dimana pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun demikian bisa saja pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *tax avoidance* terjadi (Rahmi Fadhilah, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Annisa dan Kurniasih (2012), Khoirunnisa (2015), Ghita Lisnawati (2016), Muhammad Oktofian (2015) kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian berbeda didapatkan oleh Ngadiman & Puspitasari (2014), Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada, simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.
2. Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, telah terjadi penelitian yang tidak konsisten antar penelitian-penelitian terdahulu, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang mengenai: "Pengaruh Profitabilitas dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*". Maka beberapa implikasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*), antara lain:

1. Bagi pemegang saham agar lebih memperhatikan (1) jumlah anggota dewan komisaris dalam berinvestasi. Mengingat pentingnya fungsi dan wewenang dari dewan komisaris dalam mengoperasikan perusahaan dan jumlah anggota dewan komisaris yang berlebihan atau terlalu sedikit dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. (2) tingkat profitabilitas perusahaan dalam berinvestasi, karena tingkat profitabilitas yang tinggi dapat menurunkan *tax avoidance*.
2. Bagi pihak internal perusahaan (khususnya perusahaan manufaktur yang *listed* di BEI), (1) mengungkapkan informasi yang lebih rinci mengenai aspek *Corporate Governance*. (2) membuat tingkat kepemilikan saham menjadi kepemilikan saham yang menyebar (tidak terpusat). Sesuai penelitian ini bahwa tingkat kepemilikan manajerial masih sangat rendah sehingga dapat meningkatkan *tax avoidance*.
3. Bagi pemerintah diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan informasi untuk mengkaji lebih dalam mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia agar dapat mengurangi tingkat kecurangan dalam bidang perpajakan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam menetapkan kebijakan dalam bidang perpajakan.

Saran yang dapat diberikan bagi penelitian-penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah tahun penelitian, juga dapat menambah sampel dengan menggunakan perusahaan yang bergerak di bidang lain. Misalnya: perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan maupun non keuangan.
2. Dapat menggunakan pengukuran *tax avoidance* yang berbeda agar dapat melihat perbandingan hasil yang akan didapatkan.
3. Dapat menggunakan faktor-faktor lain yang dapat diduga mempengaruhi *tax avoidance* selain *profitabilitas dan corporate governance* dan menyesuaikan dengan karakteristik yang lebih spesifik sesuai dengan perusahaan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wibawa, Wilopo, dan Yusri Abdilah. 2016. *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol 11 No. 1 2016. perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
- Agusti, Wirna Yola. 2014. *Pengaruh profitabilitas, Leverage, Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI)*.
- Agustiani, Priska W. 2013. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan*. Skripsi.
- Aisha Zuesty. 2016. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Leverage terhadap Tindakan Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2014)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Annisa, Nuralifmida Ayu, Kurniasih Lulus. 2012. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 8/No. 2. 95-199.
- Armstrong, C.S., J.L. Blouin, A.D. Jagolinzer, dan D.F. Larcker. 2013. *Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance*. Rock Center for Corporate Governance Stanford University, Working Paper Series No. 136. Diakses tanggal 29 Agustus 2013, dari <http://ssrn.com/abstract=2252682>
- Atmaja, Lukas Setia. 2008. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi dan Auditing.
- Boediono, Gideon, SB. 2005. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Solo. Simposium Nasional Akuntansi VIII. 2005
- Bovi, Maurizio. 2005. *Book-Tax Gap, An Income Horse Race*. Working Paper No. 61, Desember 2005
- Bringham, Eugene F & Houston, Joel F. 2011. *Fundamental of Financial Management: Dasar-dasar Manajemen (Edisi 10)*. Alih bahasa Ali Akbar Yulianto. Jakarta: Salemba Empat.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. *Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Simposium Nasional Akuntansi XV.
- Cahyono, Deddy Dyas, Rita Andini dan Kharis Raharjo. 2016. *Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Tindakan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013*. *Journal of Accounting* Volume 2 No.2 Maret 2016.
- Carolina, Verani., Maria Natalia dan Debbianita. 2014. *Karakteristik Eksekutif terhadap Tax Avoidance dengan Leverage sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 18, No.3 September 2014, hlm. 409- 419.
- Chen, K, P., and Chu, C. Y. C. 2010. *International Control vs External Manipulation: A model of Financial Economic*.
- Coller, P. and A. Gregory. 1999. *Audit Committee Activity and Agency Cost*. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol 18 (4-5) pp 311-332.
- Darmawan, I Gede H dan Sukartha, I Made. 2014. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak*. E-Journal ISSN 2302-8556 9.1: 143- 161
- Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- mjhy Desai, M.A. dan D. Dharmapala. 2006. *Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives*. *Journal of Financial Economics* 79 (2006), h. 145-179
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014. *Pengaruh karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia*. ISSN : 2302-8556, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.2 (2014), 2014
- Dyrend, S. Hanlon, M., dan Maydew, E. 2010. *The effects of executives on corporate tax avoidance*. *The Accounting Review*. Vol. 85 No. 4. pp 1163-1189.

- Dyreng, Scott D.; Hanlon, Michelle; Maydew Edward L. 2008. *Long-Run Corporate Tax Avoidance, The Accounting Review*, 83, 61-82
- Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Salemba Empat, Jakarta.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang, 2014.
- Faisal. 2004. *Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance*. SNA VII Denpasar, 2004.
- Fama, Eugene dan M. Jensen. 1983. *The Separation of Ownership from Control*. *Journal of Law and Economics*. Vol. 26. Page: 301-325.
- FCGI. 2001. *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Edisi Ketiga, Jakarta Frieze, A., S. Link, dan S. Mayer. 2006. *Taxation and Corporate Governance. Working Paper*.
- Fury K Fitriyah dan Dina Hidayat. 2011. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Set Kesempatan Investasi, dan Arus Kas Bebas terhadap Utang*. *Media Riset Akuntansi*, 1(1), hlm. 31-72
- Ghita Lisnawati. 2016. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Sabam Syariah yang Masuk Dalam Kelompok ISSI*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi.
- Hardika, Nyoman Sentosa. 2007. *Perencanaan Pajak: sebagai Strategi Penghematan Pajak*. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. Volume 3 No. 2. 103-112.
- Haruman, Tendi. 2008. *Struktur Kepemilikan, Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan*. *Finance and Banking Journal*.
- Herawaty, Vinola. 2008. *Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variable Dari Pengaruh Earning Management Terhadap Nilai perusahaan*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol.20. No. 2. pp.97-107.
- Hutagaol, J. 2007. *Perpajakan: Isu-isu kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu Ismoyowati, Nurbuana Tanjung. 2011. *Pengaruh Indeks Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Dewan Komisaris Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan (Studi Kasus Pada Perusahaan Go Public di Indonesia tahun 2003-2007)*. *Jurnal*.
- Jensen, M.C. dan Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), pp. 305-360.
- John Downes, Jordan Elliot Goodman. 1999. *Kamus Istilah Akuntansi*. Jakarta, Penerbit Elex Media Komputindo
- Juniarti dan Agnes Andriyani Sentosa. 2009. *Pengaruh Good Corporate Governance, Valuntary Disclosure Terhadap Biaya Hutang (Costs of Debt)*. Universitas Kristen Petra, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 11 No. 2, November 2009:88-100.
- Khoirunnisa. 2015. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Universitas Lampung
- Khurana, I. K. dan W. J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. www.ssrn.com
- Komalasari, Dessy dan Anna, Yane Devi. 2014. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2011)*. *Jurnal Akuntansi Institut Manajemen Telkom*
- Komite Nasional Kebijakan Governace (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*. Jakarta.
- Kurniasih, T. dan Sari, Maria M. 2013. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, 18, 58 - 66.
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari. 2013. *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, Volume 18. No. 1, Februari 2013.

- Lestari, Maharani Ika., Sugiharto, Toto. 2007. *Kinerja Bank Devisa Dan Bank Non Devisa Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil). 21-22 Agustus, Vol.2. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma.
- Lina. 2013. *Faktor-Faktor Penentu Pengungkapan Modal Intelektual*. Media Riset Akuntansi. 3. (1). Hal. 48-64
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Suardana, Ketut Ali. 2014. *Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.9.2, hal 525-539.
- Mahmud,m. Hanafi & Abdul, Halim. 2003. *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: AMP YKPN
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Marselina Widiastuti, Pranata P. Madiastuty, dan Eddy Suranta. 2013. *Dividend Policy and Foreign Ownership*. Simposium Nasional Akuntansi XVI, h: 3401-3423.
- Minnick, K. dan T. Noga. 2010. *Do corporate governance characteristics influence tax management?. Journal of Corporate Finance* 16 (2010), h. 703-718.
- Muhammad Fajri Saputra, Dandes Rifa, Novia Rahmawati. 2015. *Pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan karakter eksekutif terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang terdaftar di BEI*. JAAI Volume 19 No. 1, Juni 2015 1-12
- Munawir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 4. Yogyakarta: Liberty.
- Muntoro, Ronny Kusuma. 2007 *Membangun Dewan Komisaris yang Efektif*. Usahawan No.11 Th. XXXVI November 2007, hal. 9-14.
- Murtopo, Purno. 2011. *Perpajakan-Pendekatan Sertifikasi A-B-C*. Jakarta, Mitra Wacana Media
- Nasir, Mohammad dan Imanda Firmantyas Putri. 2006. *Analisis Persamaan Simultan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Insitusional, Risiko, Kebijakan Hutang, dan Kebijakan Dividen dalam Perspektif Teori Keagenan*. Simposium Nasional Akuntansi IX.
- Ngadiman, dan Christianty Puspitasari. 2014. *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Akuntansi Universitas Tarumanegara, 2014
- Oktofian, Muhammad. 2015. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Pohan, H. T. 2008. *Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik*. <http://hotmanpohan.blogspot.Com>
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram
- Pramudito, Batara Wiryo dan Sari, Maria M. Ratna. 2015. *Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance*. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.13.3 Desember (2015): 705-72.2
- Pranata, Febri M, Dwi Fitri Puspa dan Herawati. 2014. *Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi Universitas Tarumanegara, 2014
- Puspita, Silvia Ratih dan Puji Harto. 2014. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak*. Diponegoro Journal of Accounting ISSN (Online): 2337- 3806 Volume 3 No. 2.
- Putri Ayu Ningtias. 2015. *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Efektivitas Komite Audit Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2014)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi
- Retno Budhi Wiyarsi. 2012. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2010)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi
- Rinaldi, Charoline C. 2015. *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI*

- Tabun 2010-2013). Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Negeri Padang ISBN:978-602-17129-5-5. Hal. 472-483.
- Sabila, Nisa. 2012. *Pengaruh Kualitas Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan peserta Corporate Governance Perception Index (CGPI)*. Artikel Ilmiah.
- Saptatinah, Dewi, Puji Astuti. 2005. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Manajemen Laba Di Seputar Right Issue*. Skripsi Universitas Muhammadiyah, Malang. 2005
- Siahaan, Hinsa. 2004. *Teori Optimalisasi Struktur Modal dan Aplikasinya didalam Memaksimumkan Nilai Perusahaan*. Jurnal Keuangan dan Moneter. Volume 7 No. 1.
- Sisca Christianty Dewi. 2008. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Utang, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 10(1), hlm. 47- 58.
- Sofian, Syuhada dan Karinaputri, Nanda. 2012. *Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen, Profitabilitas dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010)*. Jurnal manajemen UNDIP, Volume 1, Nomor 1, Halaman 1-9.
- Solomon, Jill. 2007. *Corporate Governance and Accountability*. John Wiley & Sons, Lyd. West Sussex, England.
- Susanti, Susi dan Ikhlas Budi Riharjo. 2013. *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Cosmetics And Household*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 1 Nomor 1, 2013.
- Sutrisno. 2009. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ekonisia
- Tarigan, Josua dan Yulius Yogi Christiawan. 2007. *Kepemilikan Manajerial: Kebijakan Utang, Kinerja, dan Nilai Perusahaan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 9(1), hlm. 1-8.
- The Institute Indonesia of Corporate Governance (IICG, 2006)*. www.fcgi.or.id diunduh 15 november 2017
- Timothy, Y.C.K. 2010. *Effects of Corporate Governance on Tax Aggressiveness*. Hong Kong Baptist University. Diakses tanggal 19 Mei 2016 dari lib-sca.hkbu.edu.hk/trsimage/hp/07014341.pdf
- Ujiyantho dan Pramuka, 2007. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan go publik Sektor Manufaktur)*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Utami, Nurindah Wahyu. 2013. *Pengaruh Struktur Corporate Governance, Size, Profitabilitas Perusahaan terhadap Tax Avoidance*. Skripsi UNS
- Wahab, N.S Adul., & Holland, K. 2012. *Tax Planning, Corporate Governance and Equity Value*. *The British Accounting Review*, 44, 114-124
- Wahidahwati. 2002. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada kebijakan Hutang perusahaan: Sebuah Perspektif Agency Theory*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 2002.
- Wakid, Nadiah Lutfi, Iwan Triyuwono dan Prihat Assih. 2012. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- www.ortax.org diunduh 28 desember 2017
- Zhou, Y. 2011. *Ownership Structure, Board Characteristics, and Tax Aggressiveness*. Thesis, Lingnan University